[Kota Wajib Pajak], [Tanggal Surat Diterbitkan]

Nomor : [Nomor Surat]  
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen  
Perihal : Pemberitahuan Kendala Pembayaran dan Pelaporan

SPT Masa PPh Pasal 21 Akibat Gangguan Sistem Core Tax

Yth. **Kepala KPP** **[Nama KPP Terdaftar]**

[Alamat KPP Terdaftar]  
Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Pelapor]

NPWP : [NPWP Pelapor]

Jabatan : [Jabatan Pelapor]   
No. HP : [No. HP Pelapor]

Alamat : [Alamat Pelapor]

Bertindak selaku\*\*) : Wajib Pajak Wakil Kuasa Hukum

X

Nama : [Nama Wajib Pajak Badan]

NPWP : [NPWP Wajib Pajak Badan]

Alamat : [Alamat Wajib Pajak Badan]

E-mail : [Email Wajib Pajak Badan]

Dalam kapasitas saya sebagai **[Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Usaha[[1]](#footnote-1)]**, dengan ini memberitahukan bahwa sejak diberlakukannya **sistem Coretax** secara wajib, saya/badan usaha saya mengalami **kesulitan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak**, khususnya **SPT Masa PPh Pasal 21/ SPT Masa Unifikasi/ SPT Masa PPN[[2]](#footnote-2)**.

Gangguan ini terjadi akibat **kegagalan sistem Coretax**, yang menyebabkan:

* **Kesulitan akses ke sistem**, mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan.
* **Error dalam penginputan data**, sehingga pelaporan tidak dapat diproses.
* **Masalah pada Pembuatan Kode Billing:**, mengakibatkan pembayaran tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Kami memahami bahwa berdasarkan **Keterangan Tertulis DJP Nomor: KT-02/2025 tertanggal 10 Januari 2025**, pada paragraf 4 dinyatakan bahwa:

*"Terkait implementasi Coretax DJP, Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak. DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru."*

Namun hingga saat ini, **belum ada peraturan resmi yang membebaskan sanksi administrasi** terkait keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa akibat gangguan sistem. Oleh karena itu, melalui surat ini, kami ingin memastikan bahwa DJP **tidak mengenakan sanksi administrasi** kepada kami sebagai akibat dari kendala sistem yang berada di luar kendali kami.

Sebagai bentuk bukti dan dokumentasi, kami melampirkan:

1. **Salinan Keterangan Tertulis Nomor: KT-02/2025 terkait Implementasi Core Tax DJP Tanggal 10 Januari 2025.**
2. **Tangkapan layar hasil error sistem Coretax pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan/atau pelaporan.**

Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk pemberitahuan resmi dan **akan kami gunakan sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa pajak** terkait keterlambatan yang **bukan** merupakan kesalahan dari pihak kami sebagai Wajib Pajak.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tanggapan dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**[Nama Wajib Pajak/Badan Usaha]**  
**[Jabatan, jika badan usaha]**

**[Tanda tangan dan stempel, jika badan usaha]**

1. Pilih Salah Satu [↑](#footnote-ref-1)
2. Pilih Salah Satu [↑](#footnote-ref-2)